
Pesantren Sebagai Prefensi Pendidikan Karakter: Kritik Terhadap Kebijakan Pengiriman Siswa ke Barak dalam Perspektif Etika Pendidikan

¹khoirul Ulum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
e-mail: 1khoirull.498@gmail.com

Abstrak

Dunia pendidikan saat ini sedang diguncang oleh kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer sebagai solusi pendidikan karakter humanis. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan militer efektif dalam membentuk disiplin dan ketertiban siswa. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan komprehensif dari perspektif etika pendidikan. Terutama terkait dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan metode pembelajaran yang membebaskan. Penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengkaji dan mengkritik pendidikan di barak dalam membangun karakter dan menawarkan sistem pendidikan pesantren sebagai preferensi humanis yang lebih etis dan konstruktif. Seperti peneliti lainnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen sebagai sumber utama. Serta analisis kritis terhadap praktik pendidikan di barak militer dan pondok pesantren. Kemudian peneliti mengeksplorasi secara konseptual dan normatif, terkait dengan kebijakan penyertaan siswa ke barak dengan membandingkan nilai-nilai pendidikan humanis yang dibangun dalam sistem pondok pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di barak cenderung menggunakan tekanan struktural dan pemaksaan melalui mekanisme tekanan fisik yang berdampak pada psikologi anak, dan berpotensi melanggar prinsip kebebasan dan penghormatan terhadap siswa sebagai mata pelajaran pembelajaran. Sebaliknya, sistem pondok pesantren menawarkan pendekatan relasional, spiritual, dan transformatif yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan humanis. Oleh karena itu, pondok pesantren dapat dijadikan preferensi alternatif dalam menyekolahkan siswa yang bermasalah daripada ke barak yang cenderung lebih memaksa pendidikan.

Kata kunci: Pesantren, Pendidikan Karakter, Barak, Etika pendidikan.

Abstract

The world of education is currently being shaken by the policy of sending naughty students to military barracks as a solution for humanistic character education. This policy is based on the assumption that the military approach is effective in forming student discipline and order. However, this policy raises comprehensive questions from the perspective of educational ethics. Especially related to respect for human dignity and liberating learning methods. This study certainly aims to examine and critique education in barracks in building humanistic character and offering the Islamic boarding school education system as a humanistic preference that is more ethical and constructive. Like other researchers, this study uses a qualitative method with a literature study approach as the main source. As well as a critical analysis of educational practices in Islamic boarding schools and education in barracks. Then the researcher explores conceptually and normatively, related to the policy of sending students to barracks by comparing the values of humanist education constructed in the Islamic

boarding school system. The results of this study indicate that education in barracks tends to use structural pressure and coercion through physical pressure mechanisms that have an impact on children's psychology, and has the potential to violate the principles of freedom and respect for students as learning subjects. In contrast, the Islamic boarding school system offers a relational, spiritual, and transformative approach that is more in line with the principles of humanist education. Therefore, Islamic boarding schools can be used as an alternative preference in sending problematic students rather than to barracks which tend to be more coercive education.

Keywords: Islamic Boarding School, Character Education, Barracks, Educational ethics.



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Dalam beberapa pekan ini, kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke lembaga militer atau dikenal dengan barak untuk pendidikan karakter marak dilakukan, hal ini atas kebijakan gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menyelesaikan kenalakan pelajar. Sebagai kaum akademisi, kebijakan pendidikan tidak pernah lepas dari nilai-nilai yang menjadi landasan dasar dalam merancang arah serta tujuan pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, perdebatan antara pendekatan pendidikan yang menekankan pada kedisiplinan militeristik dan pendekatan yang humanistik terus bergulir. Terlebih setelah ada pelaksanaan pengiriman siswa ke barak-barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter. Kebijakan ini meskipun dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperbaiki kedisiplinan dan moralitas generasi muda, tentu menimbulkan polemik dikalangan pendidik, orang tua, dan pengamat pendidikan.

Dalam sejarahnya, pendidikan Indonesia selalu bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan spiritualitas. Pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di nusantara, hadir dengan pendekatan khas yang menekankan adab, nilai, dan pembentukan kepribadian melalui keteladanan, pembiasaan, serta relasi yang dialogis antara guru dan murid (Ngimadudin, Muhammad Akip, Megi Andika, 2024). Model ini berakar pada tradisi Islam yang memandang manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, bukan sekadar objek yang harus "dibentuk" secara keras dan kaku (Paulo Freire, 2005).

. Kebijakan pengiriman siswa ke barak cenderung menyederhanakan masalah pendidikan menjadi soal disiplin semata. Padahal, krisis pendidikan yang kita hadapi tidak hanya soal perilaku siswa yang membandel, melainkan juga menyangkut krisis teladan, rendahnya partisipasi keluarga, hingga persoalan struktural dalam sistem pendidikan kita. Solusi yang bersifat represif tidak menyentuh akar masalah dan justru berisiko menimbulkan trauma psikologis bagi siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dilandasi prinsip "ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" (Reksa Adya Pribadi, Mutakarikah, Achmad Firmansyah Putra Imandha, 2024). Bukan tekanan dari atas yang bersifat komando, melainkan bimbingan yang menumbuhkan daya cipta dan rasa percaya diri.

Pendekatan pendidikan yang terlalu militeristik juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya kepekaan sosial dan empati. Dalam jangka panjang, model seperti ini berpotensi mencetak generasi yang patuh namun tidak kritis, taat namun tidak kreatif,

serta berani namun kering spiritual (Khoirul, 2021). Dalam situasi seperti ini, pesantren tampil sebagai model yang tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk dipertimbangkan ulang sebagai preferensi dalam pendidikan karakter. Pesantren menawarkan ruang untuk tumbuhnya nilai-nilai spiritualitas, empati sosial, dan tanggung jawab pribadi. Hal inilah yang sangat dibutuhkan dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab, tanpa melakukan tindakan koersif.

Pesantren juga menawarkan model pendidikan yang lebih membumi dan berbasis nilai-nilai luhur. Pesantren membentuk karakter melalui pembiasaan, keteladanan, serta relasi personal yang hangat antara kiai dan santri. Pendidikan tidak dipaksakan, tetapi dibimbing, tidak mengandalkan ancaman, tetapi teladan. Dalam kultur pesantren, kedisiplinan tumbuh bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat dan tanggung jawab. Kesadaran moral dibangun bukan dengan tekanan eksternal, melainkan melalui perenungan spiritual yang mendalam. Inilah model pendidikan etis yang tidak hanya mendidik, tetapi juga merawat kemanusiaan peserta didik (Dhofier, 1994).

Bahkan menurut (Masdar Hilmy, 2009) lulusan pesantren memiliki integritas dan daya tahan social yang lebih tinggi dibanding peserta didik dari institusi umum. Ini artinya mengapa kebijakan terhadap siswa bermasalah lebih cenderung pada institusi militer dalam upaya pembentukan karakter siswa, dari pada mendorong penguatan di dalam sistem pesantren yang lebih humanis. Apakakah ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pendidikan yang mengakar pada kultur local, atau justru merupakan manifestasi dari cara pandang teknokratis yang hanya melihat pendidikan semata sebagai alat control sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kegelisahan etis atas kecenderungan militerisasi dalam kebijakan pendidikan karakter dari pada pesantren. Dengan menjadikan pesantren sebagai titik pijak analisis, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai, dialog, dan relasi kemanusiaan jauh lebih relevan dan berkelanjutan. Analisa kritis ini tidak ditujukan untuk menafikan pentingnya disiplin, tetapi untuk mengingatkan bahwa disiplin yang lahir dari rasa hormat dan kesadaran jauh lebih kuat daripada disiplin yang dibentuk dengan tekanan dan rasa takut. Karena Pesantren adalah salah satu wujud dari pendidikan yang mengedepankan nilai dan kemanusiaan serta mengedepankan etika pendidikan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pendidikan barak militer setidaknya pernah dilakukan oleh (Khairul Fahruzy, dkk 2025) yang berfokus pada efektifitas program barak militer dalam mengatasi siswa atau remaja bermasalah di provinsi Jawa Barat. Kemudian penelitian kedua oleh (Parhi, 2025) yang focus pada analisis gagasan Dedi Mulyadi tentang pendidikan karakter remaja melalui model barak militer. Sehingga berdasarkan tinjauan Pustaka diatas, kritik terhadap kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam perspektif etika pendidikan dan pesantren sebagai prefensi pendidikan karakter belum pernah dilakukan.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan menganalisis secara interpretatif makna serta implikasi etis dari dua pendekatan pendidikan yaitu militeristik dan humanistik. Fokus penelitian terletak pada pemahaman nilai-nilai pendidikan karakter yang tercermin dalam kebijakan dan praktik lembaga. Sebagaimana pendapat (Mulyana, 2013) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data

dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Fakta tersebut melalui fenomena kebijakan pendidikan militeristik dan humanistik. Serta menfokuskan pada subjek pemahaman nilai-nilai pendidikan karakter yang tercermin dalam kebijakan dan praktik Lembaga.

Adapun jenis peneletian ini adalah studi dokumen dengan analisis kritis. Nantinya peneliti mengkaji berbagai dokumen seperti dokumen kebijakan, (pernyataan resmi atau surat edaran dinas pendidikan) artikel ilmiah, opini publik, dan literatur akademik mengenai sistem pesantren, etika pendidikan, filsafat pendidikan, serta praktik pedagogisnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Wasil, 2022) bahwa studi dokumen adalah kajian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian yang relevan.

Sedangkan penganalisisan data menggunakan analisis isi dan analisis wacana kritis. Fokus analisis diarahkan pada Identifikasi nilai-nilai etika pendidikan (seperti kebebasan, penghormatan terhadap martabat manusia, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral). Kemudian peneliti membandingkan antara nilai-nilai pendidikan dalam pesantren dan pendidikan barak militer. Selanjutnya peneliti akan memvalidasi data dengan triangulasi sumber terhadap kredibilitas referensi, hanya sumber yang relevan, sah, berasal dari institusi, dan penulis kompeten yang dijadikan acuan dalam analisis penelitian ini.

Temuan dan Pembahasan

Paradigma Baru Militeristik dalam Pendidikan

Dalam beberapa pekan terakhir, terdapat tren baru dalam kebijakan pendidikan nasional yang menunjukkan perubahan paradigma ke arah pendekatan yang lebih mengedepankan aspek militer. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan dan program pelatihan karakter yang memprioritaskan disiplin, kepatuhan, serta struktur hierarkis, bahkan sampai mengirimkan para siswa ke lembaga-lembaga semi-militer seperti barak (Singgih Wiryono & Robertus Belarminus, 2025). Pendekatan ini tentunya memunculkan perdebatan mengenai etika dan pedagogi, mengingat esensi pendidikan bukan hanya proses pembentukan perilaku, tetapi juga pengembangan manusia secara menyeluruh agar menjadi individu yang merdeka baik secara moral maupun intelektual.

Paradigma baru militeristik dalam pendidikan lebih menekankan pada ketaatan total otoritas, adanya struktur hierarkis yang ketat, penerapan hukuman secara fisik atau mental, serta kurangnya dialog dan partisipasi dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, siswa tidak dipandang sebagai subjek aktif yang memiliki potensi harus dikembangkan, melainkan sebagai objek yang harus ditata dan dikendalikan. Dalam pandangan paulo freire ini merupakan pendidikan gaya bank (banking education) yaitu pendidikan bertransformasi menjadi alat untuk penjinakan, bukan pembebasan (Sri Wahyuni, 2021).

Kebijakan pendidikan militeristik seblumnya sudah ada melalui program bela negara yang dimulai pada tahun 2015. Program ini awalnya ditujukan untuk mahasiswa, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup siswa di tingkat sekolah menengah. Kegiatan dalam program ini didominasi oleh aktivitas yang bernuansa militer, seperti baris-berbaris, latihan fisik, dan sosialisasi yang dilakukan oleh anggota TNI. Pendekatan bela negara dianggap lebih mirip dengan pelatihan militer ketimbang proses pendidikan yang lebih manusiawi dan dialogis (Irwan Triadi & Lia Agustina, 2024). Dalam pelaksanaannya, program ini tampak tidak memberikan usaha yang memadai untuk mengadaptasi metode militer dengan prinsip pendidikan, terutama terkait dengan tahap perkembangan dan kebutuhan emosional para peserta didik. Inilah yang kemudian menjadi dasar pengiriman siswa kebarak militer, alih-alih kebijakan ini untuk mahasiswa dalam pendidikan bela negara sebelumnya. Kemudian

berlanjut pada kebijakan pengiriman siswa nakal kebarak yang dianggap lebih efektif dalam membangun karakter tanpa melalui kajian kritis.

Dari perspektif etika pendidikan, model militer mengkontradiksikan prinsip dasar pendidikan sebagai pengembangan kemanusiaan. Paulo Freire, seorang figur penting dalam pedagogi kritis, menekankan bahwa tujuan pendidikan haruslah mengembangkan kesadaran kritis pada siswa, bukan sekadar mendorong kepatuhan tanpa berfikir (Abidin, 2022). Pendidikan merupakan proses dialog yang memberi ruang untuk refleksi dan pembebasan, bukan indoktrinasi yang membungkam pikiran dan menghapus subjektivitas. Ketika sistem pendidikan mengadopsi pendekatan militer, ia kehilangan sifat kemanusiaannya dan bertransformasi menjadi instrumen kontrol sosial yang bersifat represif.

Dampak nyata terlihat dari meningkatnya beban psikologis yang dirasakan oleh siswa yang mengikuti pelatihan di barak. Dalam laporan tahunan Komnas Perlindungan Anak (2023), dinyatakan bahwa sejumlah siswa mengalami stres, kecemasan, bahkan trauma setelah mengikuti program semacam itu. Lingkungan pendidikan yang mengekang justru membawa dampak sebaliknya terhadap perkembangan karakter anak, karena rasa takut menggantikan rasa percaya diri, dan ketundukan menggantikan tanggung jawab individu. Hal ini juga diperkuat oleh pakar psikolog UGM Novi Candra, mengatakan pengiriman anak-anak remaja bermasalah ke barak militer dapat menimbulkan dampak negatif yaitu trauma karena *culture shock* atau gegar budaya (Ahmad Solkan, 2025).

Dalam situasi ini, pendekatan yang bersifat militer tidak hanya gagal dalam mencapai tujuan pembentukan karakter, tetapi juga merusak asas-asas dasar pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa sasaran pendidikan adalah untuk "mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan, memiliki akhlak yang baik, sehat, berpengetahuan, terampil, inovatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Sasaran ini memerlukan sebuah proses pendidikan yang memberdayakan, merangsang kreativitas, dan menguatkan tanggung jawab moral, bukan sekadar menghasilkan kedisiplinan yang dibuat-buat melalui paksaan fisik.

Secara komprehensif pandangan ini menggambarkan sikap negara terhadap generasi muda sebagai subjek yang perlu diawasi, bukan sebagai individu yang dapat dipercayai dan diberdayakan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai bidang etika, tetapi sebagai alat untuk keamanan politik. Pendekatan militer membuat sekolah dianggap sebagai zona berisiko yang perlu dilindungi, alih-alih sebagai komunitas pembelajaran yang didirikan atas dasar kepercayaan, dialog, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperiksa dari perspektif etika pendidikan. Etika tidak hanya mencakup apa yang baik dan buruk dalam tindakan, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat individu dan hubungan yang adil antara guru dan siswa. Pendidikan yang beretika adalah pendidikan yang mengembangkan otonomi moral, bukan hanya mengatur tingkah laku fisik. Thomas Lickona, (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter yang sejati tidak bisa dipaksakan melalui disiplin yang kaku, tetapi harus dikembangkan melalui kebiasaan, contoh yang baik, dan keterlibatan emosional yang tulus.

Pesantren sebagai preferensif dari model militeristik, memberikan cara yang lebih berfokus pada nilai kemanusiaan dalam pengembangan karakter. Di lingkungan pesantren, disiplin memang memiliki peranan penting dalam pendidikan, namun hal tersebut berkembang dari budaya internal yang dibentuk atas fondasi hubungan yang baik antara santri dan kiai, serta kehidupan bersama yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan etika.

Metode ini tidak hanya lebih berorientasi pada kemanusiaan, tetapi juga lebih berhasil dalam jangka panjang karena mendidik dari dalam diri, bukan melalui paksaan eksternal.

Pesantren sebagai Prefensi Pendidikan Karakter yang Relasional dan Religius

Di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai pendidikan karakter yang cenderung bersifat militeristik, pesantren memberikan opsi yang berbeda dengan pendekatan yang lebih humanis dan religius. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, tetapi juga sebagai ruang budaya di mana kepribadian santri berkembang melalui hubungan sosial, pengalaman spiritual, dan teladan yang terjalin secara alami. Dalam hal ini, pesantren bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga sebuah ekosistem nilai yang membentuk karakter secara komprehensif yaitu akal, hati, dan perilaku.

Berbeda dengan model pendidikan barak militer yang menekankan struktur komando dan kedisiplinan ketat, pesantren mengembangkan kedisiplinan berbasis relasi afektif antara santri dan kiai. Relasi ini bukan relasi otoritas semata, melainkan ikatan batin yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai melalui keteladanan dan penghayatan. Kiai, dalam tradisi pesantren, tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur moral yang memberi contoh nyata tentang hidup yang berakhlak (Ijudin, 2021). Dalam relasi ini, santri belajar bukan karena takut dihukum, tetapi karena ingin meneladani.

Proses pembentukan karakter dalam pesantren bersifat integral. Santri tidak hanya diajarkan ilmu keagamaan dalam ruang kelas, tetapi juga dilatih untuk hidup bersama dalam sosial, mematuhi jadwal harian, menjaga kebersihan, mengatur waktu, serta saling tolong-menolong dalam kegiatan sehari-hari. Keseharian ini menjadi ladang latihan nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, dan empati (Azra, 2012). Dalam hal ini, pendidikan karakter di pesantren berlangsung secara kultural dan kontekstual, bukan melalui pendekatan teknis atau proyek jangka pendek.

Lebih dari itu, dimensi religius dalam pesantren memberikan landasan spiritual bagi pembentukan karakter. Pendidikan agama bukan hanya dimaknai sebagai penguasaan ilmu fikih atau tafsir, tetapi sebagai proses pembinaan akhlak dan penyucian hati (*tazkiyatun nafs*) (Siti Mutholingah, 2021). Ibadah yang dijalankan secara rutin, seperti salat berjamaah, zikir, dan pengajian kitab kuning, membentuk kesadaran transendental dalam diri santri bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban tidak hanya secara sosial, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Dimensi religius inilah yang membedakan pendekatan pesantren dengan model pembentukan karakter sekuler yang cenderung teknokratik. Jika pendidikan karakter di barak militer seringkali dibatasi pada kedisiplinan komando, maka di pesantren nilai dan moralitas menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nilai tidak diajarkan secara verbal semata, melainkan dibiasakan dan dihidupkan. Karena itu, santri mengalami proses pendidikan karakter secara organik, bukan artifisial (Susanti Mutiara Annisya & Gakuh Gery Resty, 2025).

Keunggulan pesantren dalam membentuk karakter juga terletak pada lingkungan yang menjadi ruang kontemplatif sekaligus komunitas praktik yang memungkinkan nilai ditanamkan secara mendalam dan tahan lama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pesantren merupakan komunitas pendidikan berbasis nilai religius dan kultural yang secara konsisten memelihara tradisi pembinaan moral (Zakiyuddin Baidhawiy, 2017). Dalam menghadapi krisis moral di kalangan generasi muda, pendekatan pesantren menjadi sangat relevan daripada pendidikan barak militer. Dalam hal ini, pesantren juga dapat mengambil

peran strategis sebagai pusat pendidikan karakter nasional yang berbasis nilai-nilai lokal dan spiritualitas secara universal.

Dengan berbagai kelunggulannya, pesantren menawarkan cara pandang pendidikan karakter yang lebih manusiawi dan kontekstual. Model ini menegaskan bahwa pembentukan karakter bukanlah proses pemaksaan, melainkan sebuah proses pendampingan yang menumbuhkan kesadaran moral melalui relasi dan keteladanan. Pendidikan yang sesungguhnya, sebagaimana yang hidup dalam tradisi pesantren yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia dengan kasih sayang bukan dengan rasa ketakutan.

Tabel 1. Perbandingan Pendidikan Barak dan Pesantren

| Aspek Kajian | Pendidikan di Barak | Pendidikan di Pesantren |
|----------------------------------|--|---|
| 1. Tujuan Pendidikan | Menanamkan disiplin dan ketundukan melalui konsep militer | Menumbuhkan akhlak, kemandirian, dan kesalehan melalui konsep nilai keagamaan |
| 2. Metode Pendidikan | Intruksi satu arah (banging education), komando, dan hukuman | Dialog, keteladanan, dan pembiasaan nilai |
| 3. Relasi Pendidik-peserta didik | Relasi hirarkis dan formal (atasan-bawahan) | Relasi afektif dan spiritual (santri-kyai) |
| 4. Pendekatan Etika | Represif dan koersif (menekankan ketaatan kaku) | Persuasive dan transformative (menekankan kesadaran moral) |
| 5. Kegiatan Harian | Disiplin fisik dan rutinitas terstruktur komando | Kolektif berbasis nilai, ibadah, kajian, tanggung jawab sosial |
| 6. Dimensi Religius | Tidak menjadi focus utama | lebih kondusif terhadap stabilitas emosi dan pertumbuhan spiritual |
| 7. Orientasi Nilai | Nasionalisme dan loyalitas pada negara | Keimanan, akhlak, dan toleransi |
| 8. Sumber kedisiplinan | Eksternal (perintah, hukuman, ketakutan) | Internal (kesadaran, tanggung jawab, cinta kepada guru dan ilmu) |

Kesimpulan

Kebijakan pengiriman siswa ke barak sebagai upaya penanaman disiplin dan pembentukan karakter, jika ditelaah dalam perspektif etika pendidikan, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Pendekatan militeristik dalam pendidikan cenderung mengedepankan ketertiban melalui tekanan, ketakutan, dan kepatuhan struktural, yang pada akhirnya mengabaikan aspek relasional dan kesadaran moral peserta didik. Model ini berisiko melahirkan generasi yang patuh secara formal, tetapi rapuh secara psikologis dan spiritual, karena pendidikan dipisahkan dari konteks kemanusiaan dan nilai-nilai luhur.

Sebaliknya, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dan komunitas hidup bersama menawarkan alternatif yang lebih etis, kontekstual, dan

berkelanjutan. Pendidikan karakter di pesantren tumbuh dalam relasi spiritual antara santri dan kiai, berlangsung dalam kehidupan harian yang menyatu antara belajar, beribadah, dan hidup bersama. Proses ini tidak hanya menanamkan disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga membentuk kesadaran moral yang bersumber dari dorongan batin, bukan paksaan eksternal. Dalam pesantren, nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan empati tidak diajarkan secara teoritis semata, melainkan dihidupi dan diwariskan melalui teladan.

Dengan demikian, pesantren layak dipertimbangkan sebagai preferensi utama dalam pendidikan karakter, terutama di tengah tantangan krisis moral generasi muda saat ini. Dalam hal ini, etika pendidikan menuntut pendekatan yang memanusiakan peserta didik dan menghargai proses pembentukan kepribadian secara utuh melalui dialog, dan keteladanan bukan sekadar melalui tekanan dan ketakutan. Oleh karena itu, alih-alih mengadopsi model pendidikan barak, kebijakan pendidikan seharusnya mendukung model pembinaan karakter yang berakar pada budaya lokal dan spiritualitas, sebagaimana ditawarkan oleh pesantren.

Referensi

- [1]. Abidin, Z. (2022). *Paulo Freire: Pedagogia Kritis dan Penguatan Civil Societ di Indonesia*. DIVA Press.
- [2]. Ahmad Solkan. (2025). Ini Dampak Negatif dan Positif Pendidikan Anak di Barak Militer Menurut Psikolog. *NUONLINE*.
- [3]. Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Kencana.
- [4]. Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- [5]. Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- [6]. Ijudin. (2021). *Strategi Pengembangan Pendidikan Pesantren*. Pena Persada.
- [7]. Irwan Triadi & Lia Agustina. (2024). Peran Pendidikan dalam Membentuk Kesadaran Bela Negara di Kalangan Genarasi Muda Indonesia. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 221–235.
- [8]. Khairul Fahruzy, Rychard Instya Kurnia Putra, Aswandi, Christian Arie Anwari, Y. Y. (2025). Efektifitas Program Barak Militer Solusi Untuk Mengatasi Siswa/ Remaja Bermasalah di Provinsi Jawa Barat. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27356>
- [9]. Khoirul. (2021). *Kritik Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Perspektif Pendidikan Islam*. Literasi Nusantara.
- [10]. Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2023). *Kekerasan Struktural di Dunia Pendidikan*.
- [11]. Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. BANTAM Books.
- [12]. Masdar Hilmy. (2009). Pesantren and Human Resource Development in Indonesia. *Journal of Indonesia Islam*, 3(2), 357–373.
- [13]. Mulyana, D. (2013). *Metode penelitian Kualitatif*. 18.
- [14]. Ngimadudin, Muhammad Akip, Megi Andika, M. S. dan M. A. (2024). Sistem Pesantren Sebagai Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 131–139.

- [15]. Parhi, N. Z. (2025). Analisis Gagasan Kang Dedi Mulyadi tentang Pendidikan Karakter Remaja melalui Model Barak Militer. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/muadalah.v13i1.16723>
- [16]. Reksa Adya Pribadi, Mutakarikah, Achmad Firmansyah Putra Imandha, N. (2024). Implementasi Konsep Ing Ngarso Sung Talado, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani Dalam Perspektif Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Tranformasi*, 10(1), 60–67.
- [17]. Singgih Wiryono & Robertus Belarminus. (2025). *Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kirim Pelajar Bandel Kebarak Militer*.
- [18]. Siti Mutholingah. (2021). Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyah al-Nafs) dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam. *Jurnal Ta'limuna*, 10(1), 70.
- [19]. Sri Wahyuni. (2021). Milirisasi Pendidikan dalam Perspektif Kritis. *Jurnal Etika Dan Pendidikan*, 8(1), 12.
- [20]. Susanti Mutiara Annisya & Gakuh Gery Resty. (2025). Pembentukan Karakter Generasi Berakhlak Islami Sesuai Manajemen Pendidikan Pesantren. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 29–37.
- [21]. Wasil, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- [22]. Zakiyuddin Baidhawiy. (2017). Pendidikan Pesantren Sebagai Alternatif Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 11.